

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program pemberdayaan masyarakat suatu daerah dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pertumbuhan dalam suatu perekonomian masyarakat. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi bisa dilihat apabila kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka kemiskinan menurun. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah program pemberdayaan masyarakat terutama bila dikaitkan dengan pengembangan keterampilan usaha, peningkatan pendapatan, serta skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Pertumbuhan ekonomi merupakan konsep kenaikan GDP atau GNP lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah data perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2022.

Tabel 1.1
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2022

Tahun	Kuartal	Nilai PDRB (Rp Miliar)	Tahun	Kuartal	Nilai PDRB (Rp Miliar)
2015	I	5771083301	2019	I	6717573161
	II	5830238917		II	6776278778
	III	5889394533		III	6835884394
	IV	5948550149		IV	7689504001
2016	I	6007705766	2020	I	5654195626
	II	5666861382		II	5513351243
	III	6126016998		III	5472506859
	IV	6185172615		IV	5631662457
2017	I	6244328231	2021	I	6490818092
	II	6303483847		II	7249973708
	III	6362639464		III	7309129324
	IV	5942179508		IV	7368284941

Lanjutan tabel 1.1

Tahun	Kuartal	Nilai PDRB (Miliar)	Tahun	Kuartal	Nilai PDRB (Miliar)
2018	I	6480950696	2022	I	7427440557
	II	6540106312		II	7486596173
	III	6599261929		III	7545751789
	IV	6658417545		IV	7604907406

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah PDRB tertinggi pada kuartal IV sebesar 5948550149 miliar dan terendah pada kuartal I sebesar 5771083301 miliar. Kemudian pada tahun 2016 tertinggi pada kuartal IV sebesar 5666861382 miliar. Pada tahun 2017 tertinggi pada kuartal III sebesar 6362639464 miliar dan terendah pada kuartal IV sebesar 594179508 miliar. Pada tahun 2018 tertinggi pada kuartal IV sebesar 6658417545 miliar dan terendah pada kuartal I sebesar 6480950696 miliar. Pada tahun 2019 tertinggi pada kuartal IV sebesar 7689504001 miliar dan terendah pada kuartal I sebesar 6717573161 miliar. Pada tahun 2020 tertinggi pada kuartal I sebesar 5654195626 miliar dan terendah pada kuartal III sebesar 5472506859 miliar. Pada tahun 2021 tertinggi pada kuartal IV sebesar 7368284941 miliar dan terendah pada kuartal I sebesar 6490818092 miliar. Kemudian pada tahun 2022 tertinggi pada kuartal IV sebesar 7604907406 miliar dan terendah pada kuartal I sebesar 7427440557 miliar.

Secara akumulasi besaran nilai PDRB pertahun dari tahun 2015 hingga 2019 terus meningkat, lalu di tahun 2020 mengalami penurunan yang terendah kemudian di tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan kembali. Bila dilihat dari segi triwulan terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2022 di

kuartal IV sebesar 7604907406 miliar dan tingkat penurunan terendah terjadi pada tahun 2020 di kuartal III sebesar 5472506859 miliar.

Pemberdayaan mempunyai arti bahwa pemberdayaan bisa dikatakan sebagai suatu proses mengembangkan, memandirikan masyarakat dari berbagai bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik yang berarti keseluruhan. Untuk setiap sumber daya lokal patut diketahui dan diberdayakan. Hal ini untuk menghindari masyarakat dari sikap ketergantungan kepada segala sesuatu. Dalam upaya pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, pemerintah diharapkan mampu membawa perubahan nyata. Sehingga aspek kehidupan masyarakat bermotifkan kemandirian, peningkatan kualitas hidup yang mengacu pada cara berpikir, berperilaku, dan bersikap dapat terwujud untuk seluruh lapisan masyarakat. Maka bidang pemberdayaan masyarakat merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dipaparkan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dengan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat. Adapun pakar yang mengartikan bahwa pemberdayaan usaha untuk mengupayakan, memfasilitasi masyarakat secara kelompok untuk kepentingan bersama sehingga dapat menyusun kekuatan untuk masyarakat

agar lebih berdaya. Dalam hal ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan perekonomian.

Pemberdayaan masyarakat diyakini sebagai model pembangunan alternatif yang berpusat pada pertumbuhan perekonomian, pembangunan ekonomi diharapkan dapat menekankan pada *income per capita* (pendapatan perkapita). Pemberdayaan masyarakat akan mempengaruhi perekonomian apabila dirancang serta dilaksanakan dengan fokus meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat bukannya meningkatkan produksi, pemberdayaan tertuju pada kemampuan orang, khususnya pada kelompok rentan dan lemah untuk bisa memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang akan memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya. Program dan kegiatan peningkatan pendapatan juga harus dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat, karena kemiskinan sebagai faktor utama terjadinya ketidak berdayaan.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mendukung upaya pemberdayaan desa melalui program fasilitasi pembangunan daerah pedesaan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024 yang bersifat membangun ekonomi, sosial, dan budaya yang salah satunya pembangunan desa dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam membangun kehidupan masyarakat guna mengurangi tingkat kemiskinan. Upaya pengurangan kemiskinan melalui adanya pemberdayaan masyarakat sebenarnya dengan memanfaatkan sumber daya dari daerah itu sendiri, hanya saja pemerintah ikut serta dalam pengalokasian dana desa. Karena jika tidak

adanya gerakan dari pemerintah, kemiskinan berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu pengentasan kemiskinan dilakukan dengan cara menerapkan investasi, meningkatkan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel 1.2
Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023

Tahun	Tingkat Pengangguran (persen)	Tingkat Kemiskinan (persen)
2019	3,29	6,74
2020	4,61	7,33
2021	4,91	7,51
2022	6,65	6,71
2023	5,65	6,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019-2023

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan jumlah yang meningkat setiap tahunnya, dimana puncak peningkatan jumlah pengangguran terjadi pada tahun 2022 yang berjumlah 6,65%. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung salah satunya dari akibat adanya pandemi covid-19 yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Adanya tingkat pengangguran tentunya akan berakibat pada tingkat kemiskinan. Dapat dilihat pada data diatas, bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan, hal itu dikarenakan terus bertambahnya jumlah penduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan di Kabupaten Tulungagung direalisasikan sebagai bentuk upaya untuk pengentasan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan program pelatihan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya pada bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa. Program pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh DPMD Kabupaten Tulungagung untuk masyarakat diberikan dengan tidak dipungut biaya apapun. Dimana biaya pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak DPMD Kabupaten Tulungagung ditanggung oleh pemerintah daerah menggunakan APBD.

Program pemberdayaan masyarakat dari dinas pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai program contohnya pada bidang pemberdayaan usaha ekonomi desa. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemberdayaan usaha ekonomi desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan pemanfaatan SDA, pelatihan kemitraan BUMdes se Kabupaten Tulungagung, Pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi desa. Dengan adanya program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel program pemberdayaan masyarakat dan jumlah dana yang telah direalisasikan oleh DPMD Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.3
Program Pemberdayaan dan APBD yang di Realisasikan oleh DPMD
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023

Tahun	Program Pemberdayaan	Jumlah Anggaran yang Teralisasikan (Rp)
2019	1. Pelatihan keterampilan usaha Program Jalin Matra	33.010.000,00
	2. Pembinaan pengembangan unit usaha BUMDes.	53.340.000,00
2020	1. Pembinaan pengembangan keterampilan unit usaha	33.920.000,00
	2. Pelatihan pemanfaatan SDA	44.950.000,00
2021	1. Pelatihan kemitraan usaha BUMDesa dan BUMDesma se Kabupaten Tulungagung	42.840.000,00
	2. Pembinaan penggalian potensi desa wisata	26.085.000,00
2022	1. Pembinaan tindak lanjut agen laku pandai kepada BUMDesa	31.960.000,00
	2. Pembinaan pengembangan Unit Usaha BUMDesa	30.000.000,00
2023	1. Pembinaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa	27.550.000,00
	2. Pembinaan BUMDesa dalam pengelolaan potensi desa	24.860.000,00

Sumber: Data Rekapitulasi DPMD Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.3 di atas salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan setiap tahunnya yaitu pelatihan keterampilan usaha di Kabupaten Tulungagung. Mengingat Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi berwirausaha dan kemitraan usaha yang cukup banyak, maka penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus melestarikan dan mengembangkan jaringan keterampilan usaha milik masyarakat dalam rangka membangun perekonomian desa berdasarkan prinsip-prinsip BUMdesa. Dengan adanya program pelatihan keterampilan usaha dapat menciptakan lapangan kerja sehingga kebutuhan

ekonomi masyarakat dapat terpenuhi secara berdaya dan mandiri. Keterampilan usaha juga dikaitkan dengan sikap atau kemampuan hal baru, termasuk memberi nilai tambah dan manfaat pada suatu barang atau jasa. Namun seiring berjalannya waktu, keterampilan usaha bisa dijumpai diberbagai bidang kehidupan, mulai dari agraris hingga manufaktur. Adapun ruang lingkup beberapa subsektor keterampilan usaha disajikan dalam tabel:

Tabel 1.4
Ruang Lingkup Subsektor Keterampilan Usaha

No.	Sub Sektor	Ruang Lingkup
1.	Agraris	Bergerak di bidang pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Contoh perkebunan teh, pertanian jagung, dan hutan karet.
2.	Perikanan	Bergerak di bidang perikanan. Misal tambak ikan dan pemancingan. Sama seperti bidang agraris, namun kegiatan ini hanya fokus pada produksinya saja.
3.	Peternakan	Bergerak di bidang peternakan, contoh peternak ayam, kambing, dan sapi.
4.	Industri dan Kerajinan	Bergerak di sektor industri serta kerajinan, misal kerajinan tangan dari bamboo, dan industri bakpia.
5.	Perdagangan	Bidang usaha ini dimana pelakunya bekerja sebagai pedagang. Contoh pedagang toko kelontong dan sayuran.
6.	Pelayanan Jasa	Bergerak di bidang pemberi jasa, misal biro jasa travel dan desain grafis.

Sumber: Buku Pengantar Kewirausahaan Tahun 2020²

Adanya penerapan program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, baik terhadap pengurangan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, maupun kesejahteraan. Untuk mencapai hal tersebut, masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam penyusunan program-program yang di danai oleh alokasi

² Agus Wibowo, *Pengantar Kewirausahaan*, (Semarang: Yayasan Prima Agua Teknik, 2020), hal. 72.

dana desa. Bentuk dari partisipasi masyarakat ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Brian Sanjaya, dkk yang dilakukan pada tahun 2022 pada penelitian yang dilakukan analisis pemberdayaan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil penelitian menunjukkan program pengembangan BUMDes cukup mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Selain itu BUMDes juga cukup berkontribusi terhadap masyarakat, hal ini ditandai dengan adanya pengembangan unit usaha kepada masyarakat tertentu. Selain itu, pembangunan desa juga turut menyumbangkan keterlibatannya dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembangunan, tenaga kerja dalam masyarakat yang terserap untuk membangun infrastruktur dan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan.³ Hal ini sejalan dengan fenomena yang ada di Kabupaten Tulungagung bahwa dengan adanya program pemberdayaan diharapkan mampu memberikan efek yang baik dan positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dan fakta yang ada di lapangan, terdapat beberapa kesenjangan yang perlu dikaji kembali mengenai dampak

³ Yohanes Brian Sanjaya, dkk., “Analisis Pengaruh Bumdes, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa Karangemiri, Kecamatan Pekuncen”, *Midyear International Conference*, Vol. 1 No. 1, 2022.

program pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tulungagung**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak program pemberdayaan pelatihan keterampilan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak program pemberdayaan pelatihan keterampilan usaha di Kabupaten Tulungagung terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian lebih terarah serta memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan

penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada dampak program pemberdayaan keterampilan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Penelitian ini difokuskan pada peran Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tulungagung serta kuesioner disebar kepada 82 responden.
3. Responden penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat yang pernah atau belum mengikuti program pemberdayaan di Kabupaten Tulungagung

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teori dalam pengembangan teoritis maupun praktis yang berkaitan dalam memecahkan permasalahan aktual. Berikut manfaat dari penelitian:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menunjukkan bagaimana dampak program pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai sumber pengetahuan maupun referensi penelitian serupa berikutnya sehingga bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pihak Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dalam kaitannya mengenai analisis program pemberdayaan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tulungagung. Penelitian ini juga sebagai bahan dalam mempertimbangkan pilihan strategi yang ada ketika menetapkan kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat luas bahwa program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengembangan keilmuan khususnya mengenai program pemberdayaan masyarakat pada suatu daerah dan sebagai media yang memberikan referensi maupun rujukan bagi pustaka di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai rujukan atau referensi dengan tema yang sejenis dengan menggunakan

variabel lain serta menjadi perbaikan supaya penelitian berikutnya lebih bermanfaat.

e. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman dalam menyelesaikan masalah serta meluaskan pengetahuan bagi peneliti mengenai adanya program pemberdayaan masyarakat terhadap pertumbuhan perekonomian di kabupaten Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

Dalam memudahkan memahami judul penelitian maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pada hakikatnya pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat untuk memperbaiki kehidupan.

b. Keterampilan Usaha

Keterampilan usaha merujuk pada kemampuan dan keahlian seseorang yang dibutuhkan untuk mengelola, menjalankan, dan mengembangkan sebuah bisnis atau usaha. Ini termasuk kemampuan

dalam manajemen, pemasaran, keuangan, dan kepemimpinan, serta kemampuan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis.⁴

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan jangka panjang dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yaitu mengukur berapa besar kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Program-program pengeluaran dan pendapatan negara dapat mempermudah pencapaian tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi atau dapat menekankan tingkat pertumbuhan tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai tolak ukur untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah.⁵

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam 6 (enam) bab dan dalam setiap bab terdapat beberapa sub bab sebagai perincian dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan skripsi terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto,

⁴ Ari irawan dan Hari Mulyadi, "Pengaruh Keterampilan Wirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha", *Journal of Business Management*, Vol. 1 No. 1, 2016.

⁵ Maria Sisilia dan Harsono, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010-2019", *Journal of Regional Economics Indonesia*, Vol.2 No.1, 2021.

halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman abstrak.

2. Bagian Utama

BAB I : Bagian utama atau pendahuluan yakni merupakan gambaran umum isi penelitian, dimulai dengan latar belakang atau penjelasan mengenai problematika yang akan diteliti atau alasan mengapa masalah dikemukakan. Bagian ini penting untuk diuraikan karena menunjukkan keaslian atau persoalan yang akan diteliti. Selanjutnya rumusan masalah berisi pertanyaan atau pernyataan masalah yang akan diajukan agar pembaca mengetahui gambaran yang akan diungkapkan dilapangan. Lalu dilanjutkan tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab kedua, menerangkan mengenai teori-teori yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, lalu dilanjutkan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual. Sedangkan hubungan antara bab pertama dan bab kedua adalah dalam bab ini menjelaskan teori dan berbagai variabel yang tercantum dalam judul sehingga dapat dijadikan pedoman untuk bab selanjutnya.

BAB III : Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis

data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian sehingga peneliti mengetahui cara pengaplikasian data yang diperoleh serta cara mengolah datanya.

BAB IV : Bab keempat ini menampilkan hasil penelitian yang dideskripsikan dalam bentuk temuan penelitian dan pengujian hasil data serta analisis data. Hasil analisis data tersebut diperoleh dari data primer dan sekunder. Dengan demikian, data yang disajikan dalam bab ini diperoleh dari angket dan website resmi dan diolah sehingga penulis dapat memaparkan data melakukan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V : Bab kelima memaparkan hasil pembahasan, dimana memuat keterkaitan temuan atau teori yang ditemukan dengan teori-teori sebelumnya.

BAB VI : Bab keenam berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dalam skripsi terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.